

PERAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 MAKASSAR

Sitti Sahara Syamel^{1*}, Jusman¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Indonesia

*Corresponding author email: sitti.sahara@handayani.ac.id

Article History

Received: 2 Juli 2024

Revised: 25 Juli 2024

Published: 8 Agustus 2024

ABSTRACT

Indonesia needs people who can think effectively, efficiently and productively. This can be realized if we have reliable educators who are able to produce a generation of smart and moral people. The certification policy for teachers and lecturers is indeed a strategic step to improve the quality of education in Indonesia. Formally, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards state that teachers are professionals. As professionals, teachers are required to have academic qualifications of S-1 (first degree) or D-4 (fourth diploma) in fields relevant to the subjects they hold and master competencies as learning agents. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the analysis of the impact of the teacher certification policy in the Makassar city education office, especially in Makassar 5 state vocational high schools. The type of research used is descriptive with the data analysis used is qualitative data analysis. Meanwhile, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Keywords: Role, Teacher Certification, Quality of Education

Copyright © 2024, The Author(s).

How to cite: Syamel. S. S., & Jusman. (2024). PERAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 MAKASSAR. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1224–1232. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.3105>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Kualitas pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian utama terhadap usaha meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing ditingkat global. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui kebijakan sertifikasi guru. Sertifikasi guru diharapkan dapat menjamin bahwa para pendidik memiliki kemampuan dan profesionalisme diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga untuk memberikan penghargaan yang layak bagi guru yang telah memenuhi standar tertentu.

Menurut Martini dalam (Pardede & Yafizham, 2020) mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah hal ini bukan disebabkan oleh rendahnya input pendidikan, melainkan oleh proses pendidikan yang kurang optimal serta rendahnya kualitas guru. Mulayasa dalam (Andika et al., 2022) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sekolah sangat bergantung pada guru, karena guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan pusat inisiatif pembelajaran. Oleh karena itu, guru yang profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Guru adalah ujung tombak dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan, terutama dalam membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal, Profesi guru sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan generasi penerus bangsa.

Peran guru dalam bidang pendidikan sangat strategis, bahkan sumber daya pendidikan lain sering kali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai (Sukarno et al., 2021). Oleh

karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik menjadi keharusan yang memerlukan perhatian serius. Di dalam UU No. 14 tahun 2005 dalam (Bintoro & Fitrianto, 2019) mengatakan Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa guru atau tenaga pendidik adalah salah satu pilar utama yang diperlukan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, di samping itu juga guru merupakan aspek penting dalam pendidikan yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan sebuah proses pengembangan diri menjadi lebih baik, berkarakter serta memberikan nilai yang tidak akan pernah dihitung jasanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru merupakan motor penggerak roda pengembangan sumber daya manusia menuju sebuah aspek kehidupan menjadi lebih baik.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis siswa, memainkan peran penting dalam mencetak pekerja terampil yang siap memasuki dunia industri. Dalam konteks ini, peran guru sangat krusial dalam membimbing dan mengarahkan siswa agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan diberlakukannya kebijakan sertifikasi guru, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pengajaran yang berdampak positif pada prestasi akademik dan keterampilan praktis siswa. Mulyasa

dalam (Anjarsari, 2022) yang menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat atau pengakuan bahwa guru tersebut telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Lanjut Mulyasa dalam (Manafe et al., 2023) Kompetensi guru, yaitu kemampuan pendidik, merupakan kombinasi dari kemampuan individu, pengetahuan dan teknologi, serta aspek sosial dan spiritual. Kompetensi ini mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, kemampuan sebagai pembelajar, serta pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Pada penjelasan tersebut dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, serta mampu menjadikan acuan secara signifikan dalam mengembangkan metode pembelajaran agar siswa mampu meningkatkan minat belajarnya, di samping itu kompetensi guru juga sangatlah berpengaruh pada metode yang digunakan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Fatkuroji dalam (Elwijaya et al., 2021) bahwa Kebijakan pendidikan adalah upaya untuk merumuskan langkah-langkah dan proses penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada periode waktu tertentu. Kemudian (Fatmawati, 2019) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanah & Kristiawan dalam (Nawawi, 2022)

Program sertifikasi adalah langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan pemahaman yang logis bahwa guru yang kompeten akan dihargai dengan penghasilan yang sesuai, dan sebaliknya, diharapkan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan (Asnandar, 2015). Lanjut Murdadi & Sulistari dalam (Amelia, 2019) mengatakan sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menemui berbagai tantangan. Situmorang (Permatasari, 2020) Juga ditegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dalam kebijakan publik yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian isu-isu publik. Lanjut (Lukitasari & Iriani, 2017) bahwa Implementasi kebijakan merupakan proses kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan Munadi dan Barnawi dalam (Mujiyanto, 2015) bahwa Kebijakan publik dalam bidang pendidikan mencakup berbagai hal seperti alokasi anggaran pendidikan, pembentukan kurikulum, perekrutan tenaga pendidik, pengembangan profesionalisme staf, pengelolaan aset tanah dan bangunan, manajemen sumber daya, serta kebijakan lain yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi dunia pendidikan. Olehnya itu untuk mendukung sebuah

kebijakan maka perlu diperhatikan berbagai aspek yang mendukung peran guru seperti ketersediaan pelatihan, kesiapan guru, dan dukungan institusi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran dari kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Makassar. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang diinginkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis berkaitan dengan peran dan dampak evaluasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas pendidikan Kota Makassar khususnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, masih banyak guru yang belum bersertifikat pendidik memiliki kemampuan penguasaan informasi teknologi yang minim, yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan internet. Sehingga hal tersebut dapat memperlambat kinerjanya. Bukan hanya itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, guru yang telah bersertifikat pendidik harus diberikan jadwal mengajar sebanyak 24 jam per minggu, karena peran guru sangat penting dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, maka guru harus memiliki kompetensi yang sesuai (Jannah, 2019). Sertifikasi guru juga berpengaruh terhadap perilaku ekonomi pada profesi guru baik di sekolah Negeri maupun Swasta, yang tampak dengan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka (Ramdhani et al., 2018). Akan tetapi kenyataannya ada beberapa guru yang telah bersertifikat pendidik belum memenuhi ketentuan tersebut. Dan guru tersebut diberikan kesempatan untuk dapat

mencari jam mengajar di sekolah lain untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tapi kenyataannya di lapangan, kinerja guru belum maksimal sehingga program kebijakan sertifikasi guru tidak korelasi dengan kinerja guru sehubungan dengan hal di atas maka perlu mengadakan kajian mengenai peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana peran sertifikasi guru telah mempengaruhi proses belajar mengajar di SMK Negeri 5 Makassar, serta dampaknya terhadap kinerja dan kompetensi siswa. Dalam kajian ini dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang, serta menjadi referensi bagi institusi pendidikan lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang elemen-elemen penelitian, termasuk pemilihan lokasi penelitian, jenis dan dasar penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Fadli, 2021).

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas peran sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini merupakan studi kasus, yang

bertujuan untuk memahami secara menyeluruh peran sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini mencakup kata-kata atau ucapan lisan serta perilaku manusia (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMK 5 Makassar

Jika mengacu pada peraturan pemerintah maka Sertifikasi guru merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari usaha meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Melalui program sertifikasi ini, diharapkan guru dapat menjadi pendidik yang profesional, dengan memiliki minimal latar belakang pendidikan S-1/D-4 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang dibuktikan dengan memperoleh sertifikat pendidik setelah lulus uji kompetensi. Untuk menguji kompetensi pengajar berdasarkan dengan asas sertifikasi yang didapatkan maka perlu dilakukan kajian yang mendukung dalam penelitian ini sejauh mana tingkat keberhasilan tenaga pendidik sebagai ukuran setelah melakukan sertifikasi guru sesuai dengan peraturan dalam undang-undang pendidikan. Hal tersebut dapat digambarkan peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai berikut :

1. Pengajaran Berkualitas

Peran adalah serangkaian perilaku, hak, kewajiban, dan norma yang diharapkan dari individu dalam suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Dalam konteks sosial, peran berfungsi sebagai panduan bagi individu mengenai bagaimana mereka harus bertindak dalam berbagai situasi. Peran yang dimainkan oleh individu dipengaruhi oleh harapan sosial yang melekat pada posisi yang mereka duduki, serta interaksi dengan individu lain dalam lingkungannya. Dalam organisasi, seperti sekolah atau institusi pendidikan, konsep peran menjadi sangat penting karena membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas agar mencapai tujuan bersama.

Berbagai konsep peran yang ada baik berupa dengan pendapat para ahli yang pada intinya tetap mengacu pada titik pencapaian yang dilakukan oleh seorang individu ataupun organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan. Oleh sebab itu peran merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian tujuan dari suatu program kebijakan dalam sertifikasi guru hal ini berdasarkan informasi dengan informan jika kita merujuk pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peran, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu program kebijakan tergantung pada seberapa besar pengaruh positif yang dibawanya bagi masyarakat. dalam hal ini program pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru. Melalui proses sertifikasi, mutu guru dapat ditingkatkan, terutama dalam konteks belajar-mengajar, dan kehidupan guru dapat lebih sejahtera dengan tambahan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikat pendidik. Jika dianalisis masih ada guru-guru yang memiliki kemampuan penguasaan informasi

teknologi yang minim sehingga menyebabkan peran guru tersebut tidak maksimal. Hasil pengamatan peneliti di lapangan mengenai evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru mengenai perannya setelah mendapatkan sertifikat pendidik, masih ada beberapa guru yang memiliki tingkat kemampuan penguasaan informasi yang minim.

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui peran guru yaitu kemampuannya dalam membuat perencanaan dan persiapan mengajar dengan adanya kemampuan tersebut maka peran setiap guru mampu membuat perencanaan dan mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar. Kemampuan guru yang dulunya minim tapi karena dengan diadakannya berbagai program peningkatan mutu guru pasca diklat sertifikasi membantu para guru menjadi lebih baik lagi. Jika kita hubungkan dengan teori yang efektivitas, maka dengan adanya kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi bagi para guru. Kebijakan sertifikasi dinilai efektif karena para guru telah diwajibkan untuk mampu membuat dengan adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut para guru sudah mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa nantinya.

2. Pengembangan Keterampilan Mengajar

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi adalah sebuah metrik keberhasilan yang dinilai berdasarkan seberapa besar sumber daya atau biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan. Efisiensi menjadi salah satu kriteria untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pemerintah, seperti

kebijakan sertifikasi guru. Tingkat efisiensi yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama para guru yang ada di kota Makassar terlebihnya lagi bagi guru-guru yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar.

Kebijakan sertifikasi juga menuntut guru agar mampu menguasai dan mengembangkan setiap materi pelajaran yang akan dibawakan, Kemampuan guru dalam menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswa juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja guru, Materi yang dibawakan jika dikuasai oleh guru maka akan muda bagi guru tersebut untuk menjelaskan kepada siswa. Dan juga siswa mampu memahami lebih baik materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Berdasarkan informasi dengan informan bahwa semua guru dituntut untuk menguasai materi bahan ajar, karena untuk mengajar siswa para guru harus terlebih dahulu memahami bahan ajar yang akan dibawakannya dengan begitu para guru tidak susah payah untuk menjelaskan materi bahan ajar karena telah menguasainya. Informasi tersebut dapat dianalisis bahwa jika kita hubungkan dengan teori efisien maka kebijakan sertifikasi sangatlah efisien karena bukan hanya tenaga pengajar yang telah Walaupun sertifikasi pendidik menjadi persyaratan, semua guru diharapkan memiliki penguasaan atas materi yang akan diajarkan kepada siswa. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap guru-guru di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Bukan hanya perhatian terhadap guru tapi juga perhatian terhadap siswa-siswa yang akan menjadi penerus berikutnya.

3. Penguasaan Metode Dan Strategi Mengajar

Kebijakan sertifikasi juga mampu membantu para guru untuk mengetahui atau mempelajari Kemampuan menggunakan metode dan strategi pengajaran yang efektif adalah indikator penting dalam menilai kinerja seorang guru. Responsivitas, atau kemampuan untuk merespons dan mengelola kebutuhan di tingkat pusat dan daerah, adalah cara efisien untuk menyediakan pelayanan masyarakat. Dalam konteks kebijakan sertifikasi guru, pengetahuan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat, dan secara responsif menjawab kepentingan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menanggapi dampak terhadap kebijakan sertifikasi guru di kota Makassar.

Peran sertifikasi guru membawa pengaruh positif terhadap pendidikan di Indonesia khususnya di kota Makassar, respons para guru terhadap kebijakan sertifikasi sangatlah baik. Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, Para guru mampu meningkatkan lebih lanjut penguasaan metode dan strategi mengajar yang lebih baik dari sebelumnya. Ketepatan adalah teori yang tak kalah pentingnya. Suatu kebijakan akan menjadi lebih efektif jika pemerintah dapat mengarahkannya dengan tepat pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan informasi dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa program pemerintah bagi pendidikan yaitu kebijakan sertifikasi sangatlah baik karena dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, maka para guru akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya khususnya dalam proses belajar mengajar. Dorongan motivasi yang

muncul akan produktivitas kinerja guru akan semakin meningkat yang dulunya kinerja guru sangat menurun karena kurangnya perhatian pemerintah kepada nasib para guru. Tapi dengan adanya kebijakan sertifikasi guru maka para guru semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kebijakan sertifikasi merupakan salah satu perhatian upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia khususnya di kota Makassar.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa program pemerintah bagi pendidikan yaitu kebijakan sertifikasi guru sangatlah baik karena dengan adanya kebijakan tersebut, maka para guru termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya khususnya dalam proses belajar mengajar. Dengan dorongan motivasi yang muncul maka produktivitas pekerjaan guru akan semakin meningkat yang dulunya kinerja guru sangat menurun karena kurangnya perhatian pemerintah kepada nasib para guru. Tapi dengan adanya kebijakan sertifikasi guru maka para guru semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kebijakan sertifikasi merupakan salah satu perhatian upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia khususnya di kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar mengenai Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Makassar, sudah berjalan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa hasil evaluasi kebijakan sertifikasi guru maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

Kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Makassar memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Melalui sertifikasi, guru-guru di SMK Negeri 5 Makassar diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas serta membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia industri. Dengan sertifikasi, peran guru-guru di SMK Negeri 5 Makassar mampu menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna, mereka juga dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan materi dengan metode yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan peserta didik. Selain itu, peran sertifikasi guru juga mencakup aspek pembimbingan dan penilaian siswa, guru yang tersertifikasi memiliki kemampuan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan dunia kerja. Mereka juga mampu melakukan penilaian yang objektif terhadap perkembangan siswa, sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan prestasi belajar.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Makassar membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti ketersediaan pelatihan yang memadai dan dukungan institusi yang diperlukan untuk mendukung guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan, monitoring, dan evaluasi

perlu terus dilakukan guna memastikan keberlangsungan dan efektivitas kebijakan sertifikasi guru dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. (2019). Sistem Informasi Pengolahan Data Sertifikasi Guru. *Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika*, 6(2), 161–169.
- Andika, A., Nurdin, E. S., Ruyadi, Y., Indonesia, U. P., & Indonesia, U. P. (2022). a Policy Analysis of English Teacher Certification. *Jurnal Penelitian*, 6, 86–94.
- Anjarsari, R. (2022). Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*, 8(2), 163–173.
- Asnandar, A. (2015). Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Aliyah di Kota Kendari. *Al-Qalam*, 12(1), 117–128.
- Bintoro, R. F. A., & Fitrianto, Y. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 36.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fatmawati, E. (2019). Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 1(1), 58–

- 76.
- Jannah, M. (2019). Peranan Guru Dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik Sulamul Ulum Dan Tpa Az-Zahra. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 137–165.
- Lukitasari, S. W., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Manafe, H. A., Goru, R., Naen, A. B., & Hebi, M. (2022). Dampak Sertifikasi Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Melalui Kompetensi Guru Sebagai Pemoderasi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 300-314.
- Mujianto, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi, Motivasi Dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu ...*, 3(1), 323–336.
- Pardede, Z. H., & Yafizham. (2020). Dampak Efektivitas Program Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Sman 3 Padang Sidempuan. *Visipena Journal*, 11(1), 33–45.
- Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 34–38.
- Ramdhani, M. R., Hadiwiyono, V., & Hakim, L. (2018). Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial Dan Ekonomi Guru Di Kabupaten Ngawi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(1), 106–129.
- Sukarno, S., Munadi, M., & Matin, A. (2021). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(2), 257–276.